

ABSTRAK

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN BKKBN MENJADI KEMENTERIAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROGRAM LANJUT USIA BERDAYA (SIDAYA) (Studi Pada Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung)

Oleh

AGUNG SAPUTRA WIJAYA

Transformasi kelembagaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) merupakan perubahan strategis dalam tata kelola kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga di Indonesia. Perubahan status kelembagaan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berdampak pada pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya Program Lanjut Usia Berdaya (Sidaya) yang merupakan pengembangan dari Program Bina Keluarga Lansia (BKL). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi Kelembagaan BKKBN menjadi Kementerian dan implikasinya terhadap pelaksanaan Program Sidaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Teori Perubahan Kelembagaan (*Institutional Change Theory*) dari Douglass C. North yang mencakup indikator kewenangan dan aturan formal, hubungan *principal agent*, alokasi sumber daya, serta penyelarasan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan memperkuat regulasi dan meningkatkan posisi strategis Program Sidaya dalam agenda pembangunan nasional. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan dan penyesuaian kembali terhadap alokasi anggaran yang tersedia, sehingga sejalan dengan status Program Sidaya sebagai program prioritas.

Kata kunci: Transformasi, Perubahan Kelembagaan, Sidaya, Lansia.

ABSTRACT

THE INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF BKKBN INTO A MINISTRY AND ITS IMPLICATIONS FOR THE EMPOWERED ELDERLY PROGRAM (SIDAYA)

(A Study at the Office of Kemendukbangga/BKKBN in Lampung Province)

By

AGUNG SAPUTRA WIJAYA

The institutional transformation of the National Population and Family Planning Agency into the Ministry of Population and Family Development (Kemendukbangga/BKKBN) represents a strategic change in the governance of population and family development policies in Indonesia. This change in institutional status is not merely structural but also affects the implementation of national priority programs, particularly the Elderly Empowerment Program (Program Lanjut Usia Berdaya/Sidaya), which is developed from the Elderly Family Development Program (Bina Keluarga Lansia/BKL). This study aims to analyze the implications of the institutional transformation of BKKBN into a ministry on the implementation of the Sidaya Program. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews and document analysis. Data analysis is conducted using the Institutional Change Theory proposed by Douglass C. North, which encompasses indicators of authority and formal rules, principal-agent relationships, resource allocation, and policy alignment. The findings indicate that institutional transformation strengthens regulatory legitimacy and enhances the strategic position of the Sidaya Program within the national development agenda. However, program implementation still faces challenges related to limitations in human resources and budget allocation. Therefore, a review and adjustment of budget allocation are necessary to ensure alignment with the status of the Sidaya Program as a national priority program.

Keywords: *Transformation, Institutional Change, Sidaya, Elderly.*